

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Komparatif

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendalami dan memahami makna salah satunya yang berasal dari individu atau kelompok orang terkait dengan masalah dalam penelitian dengan mendeskripsikan gagasan, pengalaman, dan penilaiannya secara naratif (Creswell & Creswell, 2018). Selain itu, objek penelitian kualitatif itu bersifat naturalistik yaitu proses pemaknaan individu, kelompok, ataupun institusi terhadap dunia kehidupan atau *lifeworld* (Flick, 2018). Hal ini berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu permasalahan kehidupan antara masyarakat sipil dari individu serta kelompok mahasiswa di Indonesia dan Malaysia yang menolak terhadap kebijakan *austerity* yang dibuat pemerintah.

Di samping itu, menurut Flick (2018) dalam desain penelitian kualitatif terdapat studi komparatif yang dipahami sebagai desain yang secara sengaja menyusun perbandingan untuk memahami persamaan dan perbedaan antar kasus, kelompok, konteks, atau dimensi tertentu dari suatu fenomena. Flick (2018) secara eksplisit memasukkan *intended comparisons* sebagai komponen desain, yaitu keputusan sadar sejak awal tentang: (1) dimensi apa yang akan dibandingkan; (2) kasus, kelompok ataupun dalam konteks siapa atau apa yang akan dibandingkan; (3) di level individu, kelompok, kasus, atau dalam konteks mana yang akan dibandingkan.

Dalam penelitian ini, studi komparatif digunakan karena adanya persamaan kasus penerapan kebijakan *austerity* dan adanya penolakan mahasiswa terhadap

kebijakan tersebut di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025, sehingga dapat dibandingkan perbedaan dalam persamaan kasus tersebut, seperti halnya dalam level komparasi dari Uwe Flick (2018) yang dielaborasi penulis agar sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 1. Level komparasi dalam Studi Komparatif dari Uwe Flick (2018).
(Dielaborasi oleh penulis, 2025)

Oleh sebab itu, penggunaan studi komparatif bertujuan untuk memecah isu penolakan mahasiswanya dengan berfokus dalam menganalisis dan membandingkan akar kebijakan *austerity*, jenis *austerity*, aksi penolakan mahasiswa, bentuk-bentuk penolakan mahasiswa, dan dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* yang berdampak ataupun belum berdampak dalam menggagalkan penerapan ataupun merevisi kebijakan *austerity* di negara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025.

3.2. Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas, yaitu *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan peneliti menentukan informan awal yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga kriteria

inklusi dalam pemilihan informan difokuskan kepada: (1) pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dan/atau peran dalam aksi penolakan terhadap kebijakan *austerity* di masing-masing negara; (2) memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan *austerity* dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 di Indonesia atau Budget Speech 2025 di Malaysia yang selaras dengan fokus penelitian ini. Kategori informan seperti yang dijelaskan adalah:

1. 2 informan kunci dari kelompok mahasiswa di Indonesia dan Malaysia
2. 4 informan utama dari individu mahasiswa di Indonesia dan Malaysia
3. 2 informan tambahan dari individu profesional yang memahami kebijakan *austerity* dari Indonesia dan Malaysia

Tabel 3.1. Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Peran/Jabatan/Profesi	Data yang diperoleh
1.	Satria Naufal Putra Ansar	Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan	Informasi terkait fakta penolakan mahasiswa di Indonesia dalam aksi “Indonesia Gelap” yang menolak terhadap kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025.
2.	Maulana Ihsanul Huda	Koordinator Isu Pendidikan dan Kesehatan BEM SI Rakyat Bangkit	
3.	Rhido Anwari Aripin	Peserta Aksi Demonstrasi dari Universitas Padjajaran	
4.	Fitrah Aryo Ahsari	Peserta Aksi Demonstrasi dari Universitas Padjajaran	
5.	Adhwa Hanifa	Peserta Aksi Demonstrasi dari Universitas Padjajaran	
6.	Mohamad Azamuddin Bin Sahar	Presiden GAMIS Malaysia	Informasi terkait fakta penolakan mahasiswa di Malaysia dalam aksi “#Tekan” dan/atau “Turun Anwar” yang menolak terhadap kebijakan pemangkasan anggaran subsidi bensin RON95 dan Perluasan SST.
7.	Anis Samihah	Wakil Ketua 2 Penerangan GAMIS Malaysia	
8.	Muhamad Fathinuddin Bin Hamdi	Pengamat langsung aksi “#Tekan” dan “Turun Anwar” dari Universiti Malaya	
9.	Muhammad Iman Khidir Tamidzi	Pengamat langsung demonstrasi “Turun Anwar” dari Universiti Malaya	
10.	Andi Aishwaryanizatul Azwa	Pengamat langsung demonstrasi “Turun Anwar” dari Universiti Malaya	

No.	Informan	Peran/Jabatan/Profesi	Data yang diperoleh
11.	Assoc. Prof. Dr. Muhammad Findi, M.Si	Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik sekaligus Dosen Ekonomi Politik di IPB University	Informasi langsung tentang kebijakan <i>austerity</i> dalam Inpres No. 1 Tahun 2025, khususnya kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan.
12.	Karunia Haganta S.Sos	Peneliti Independen	
13.	M. Iman Khidir Tamidzi, BEc;	Analisis Ekonomi di Institut Masa Depan Malaysia (MASA)	Informasi langsung tentang kebijakan <i>austerity</i> dalam Budget Speech 2025, khususnya kebijakan rasionalisasi subsidi bensin RON95 dan perluasan SST.
14.	M. Fathinuddin Bin Hamdi, B.A	Analisis kebijakan urusan publik dari pemerintahan negara bagian Johor, Malaysia	

3.3. Sumber Data

Menurut (Na'ami, 2019), dalam penelitian kualitatif jenis data terbagi menjadi kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, dan foto. Data utama dalam penelitian ini berasal dari kata-kata dan tindakan, sementara data lainnya, seperti dokumen berfungsi sebagai data tambahan. Adapun, data utama dapat dicatat dalam bentuk: (1) catatan tertulis; (2) rekaman audio; (3) foto atau video. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau lapangan, tanpa melalui perantara, langsung oleh peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2013).

Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui metode wawancara secara daring dengan narasumber yang berkompeten dan memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang mendalam terkait topik

yang diteliti. Seperti dari pihak mahasiswa serta dari pihak individu profesional yang memahami kebijakan *austerity* di kedua negara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti literatur, studi dokumentasi, atau laporan penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui catatan, arsip, dan dokumen lain yang digunakan untuk mendukung analisis data primer. Contohnya adalah dokumen resmi regulasi dan proposal kebijakan *austerity*, serta dokumen dan/atau literatur lainnya yang dapat mendukung dalam analisis isu dan dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang paling umum digunakan. Dalam proses wawancara, seorang pewawancara akan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada seorang responden atau narasumber dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan, mendalam, dan terperinci tentang topik atau subjek tertentu yang sedang diteliti. Wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh data langsung dari sumber pertama, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami perspektif, pengalaman, dan sudut pandang narasumber secara lebih

komprehensif (Waruwu, 2024). Pengumpulan data secara daring dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara secara daring melalui *Zoom* atau *WhatsApp* dengan informan.

2. Studi Dokumentasi dan Literatur

Studi dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi berupa surat, foto, video, hasil pertemuan atau rapat, artikel ilmiah, laporan lembaga survei, dan sebagainya (Fadli, 2021). Dalam penelitian ini akan menganalisis dokumen Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dari Indonesia serta dokumen Budget Speech 2025 dari Malaysia yang kedua dokumen tersebut menjadi akar kebijakan *austerity* muncul di kedua negara, lalu studi dokumentasi dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini setelah pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa analisis data kualitatif berlangsung secara interaktif dan terus-menerus hingga data dianggap cukup atau jenuh. Adapun, proses analisis data mencakup empat langkah utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan memudahkan proses tersebut. Instrumen penelitian penting karena data yang diperoleh akan menjadi dasar

untuk menjawab masalah penelitian dan menguji hipotesis. Variabel yang ada dalam hipotesis menentukan jenis data yang akan dikumpulkan.

2. Reduksi Data

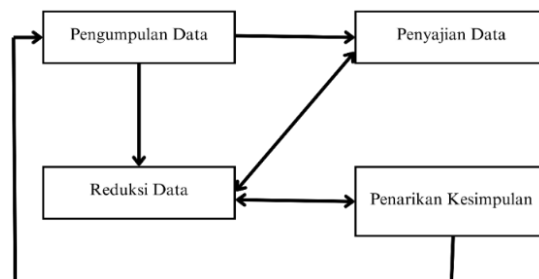
Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari catatan penelitian. Langkah ini mencakup penyaringan, penggolongan, dan pengorganisasian data sehingga hanya data yang relevan yang dipertahankan yang memudahkan penarikan kesimpulan akhir.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam analisis data kualitatif, data sering disajikan dalam bentuk naratif, menggambarkan peristiwa-peristiwa secara berurutan. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan kemudian dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Setelah wawancara dengan informan, peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mencari makna, pola, penjelasan, serta hubungan sebab-akibat yang ada, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi data yang telah dilakukan.



Gambar 3.2. Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman. (Sugiyono, 2013)

3.6. Uji Validitas Data

Dalam penelitian ini, teknik validitas data yang digunakan adalah triangulasi data dari (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini menggunakan satu jenis triangulasi, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memverifikasi data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber yang berbeda. Teknik ini juga membandingkan dan memeriksa kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari metode yang berbeda dalam penelitian kualitatif.



Gambar 3.3. Triangulasi Sumber Data. (Diolah peneliti, 2026)

Teknik triangulasi ini digunakan penulis karena posisi peneliti sebagai mahasiswa Ilmu Politik di Indonesia, jadi ada potensi bias seperti kecenderungan lebih dekat dengan narasi gerakan mahasiswa Indonesia, maka cara meminimalkan bias, penulis merujuk dokumen resmi pemerintahan di Indonesia dan Malaysia, wawancara dengan analis/akademisi, serta membandingkan data dari berbagai sumber sebagaimana terlihat pada **Gambar 3.3**.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Isu Penolakan Mahasiswa Terhadap Kebijakan *Austerity* di Indonesia dan Malaysia

A. INDONESIA

Pada awal tahun 2025, Indonesia menjadi salah satu negara dengan adanya isu penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity*. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber daring serta hasil wawancara dengan tiga kategori informan, yaitu kelompok mahasiswa, individu mahasiswa, dan individu profesional. Penelitian ini menghasilkan temuan yang menunjukkan adanya 1 jumlah massa aksi penolakan terhadap kebijakan *austerity* yang relatif besar, khususnya yang teridentifikasi dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” pada 17-21 Februari 2025.

Penyebab awal demonstrasi tersebut berakar dari kebijakan yang dianggap tidak memihak pada rakyat terutama kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang berakar dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Aturan tersebut menurut ketiga kategori informan dalam penelitian ini dianggap sebagai akar dari pemangkasan anggaran atau *austerity*.

Adapun untuk mendalami lebih dalam terkait kebijakan *austerity* di Indonesia, penulis mewawancarai 2 individu profesional yang dimulai dari pernyataan Assoc. Prof. Dr. Muhammad Findi. Beliau menyatakan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran secara teknis dapat dianggap sebagai *austerity policy*, meskipun pemerintah menggunakan narasi “efisiensi”

daripada penghematan atau *austerity*. Perspektif beliau membedakan dua konsep yang sering disamakan oleh publik namun memiliki implikasi berbeda.

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Findi juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kebijakan efisiensi dan kebijakan *austerity* dalam hal definisi dan implementasi. Menurut beliau, kebijakan efisiensi difokuskan pada perbaikan proses internal dan alokasi ulang sumber daya ke area yang lebih produktif. Sebaliknya, *austerity policy* lebih difokuskan pada pemangkasan anggaran secara ekstrem atau ketat dalam upaya menghambat pemborosan. Dengan kerangka berpikir ini, Inpres No. 1 Tahun 2025 memiliki karakteristik keduanya, baik dari aspek efisiensi maupun aspek pemangkasan yang bersifat *austerity*.

Secara formal, Inpres ini dapat dianggap sebagai *austerity policy*, salah satunya karena kementerian dan lembaga pemerintahan dianggap membebani pemerintah pusat dan tidak efisien dalam pemanfaatan anggaran. Target penghematan mencapai Rp 306,69 triliun dengan pemangkasan anggaran kementerian sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. Tujuan kebijakan mencakup pengurangan belanja yang dianggap tidak perlu yang bisa dilihat di Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025¹.

Lebih lanjut, Assoc. Prof. Dr. Muhammad Findi menyatakan bahwa meskipun berdasarkan rujukan dari IMF defisit fiskal berada di angka 2,92% masih di bawah dari 3%, kebijakan presiden Prabowo melakukan penghematan

1 Pos anggaran yang dipotong dalam Surat Menteri Keuangan tersebut berupa: (1) Alat Tulis Kantor; (2) Kegiatan seremonial; (3) Rapat, seminar, dan sejenisnya; (4) Kajian dan analisis; (5) Diktat dan bimtek; (6) Honor output kegiatan dan jasa profesi; (7) Percetakan dan souvenir; (8) Sewa gedung, kendaraan, peralatan; (9) Lisensi aplikasi; (10) Jasa konsultan; (11) Bantuan pemerintah; (12) Pemeliharaan dan perawatan; (13) Perjalanan dinas; (14) Peralatan dan mesin; (15) Infrastruktur; (16) Belanja lainnya.

(*austerity*) anggaran ini lebih disebabkan oleh tekanan politik dan ada upaya-upaya untuk mengalihkan anggaran tersebut ke hal yang lebih penting misalkan pada proyek makan bergizi gratis (MBG) yang sangat ambisius dan membutuhkan banyak anggaran baik di pusat maupun di daerah demi untuk memastikan proyek ini berlangsung secara efektif efisien. Dan kemungkinan juga ada beberapa proyek lain yang sifatnya sangat *mercusuar* yaitu pengalihan dana ke Danantara, yang sebenarnya belum tentu optimal pemanfaatannya ke depan.

Di samping itu, menurut peneliti independen Karunia Haganta, S.Sos menyatakan bahwa, meski pemerintah menggunakan narasi “efisiensi” dan “*refocusing* anggaran”, kebijakan ini secara substansial memiliki karakteristik *austerity*. Beliau juga menunjukkan ketidakcocokan antara narasi pemerintah dan realitas implementasi, khususnya dalam hal anggaran gaji pejabat yang mendominasi struktural anggaran di hampir semua kementerian.

Lebih lanjut, Karunia Haganta, S.Sos menekankan bahwa efisiensi harus dipahami melalui kacamata kebijakan yang lebih luas. Menurutnya, baik “efisiensi” maupun “*austerity*” berjalan bersandingan dalam konteks kebijakan Prabowo secara umum dan yang perlu dipertanyakan adalah apakah *refocusing* anggaran sudah efisien atau sekadar kepentingan politik Prabowo untuk menyokong karir politiknya? Haganta mengungkapkan kekhawatiran bahwa efisiensi anggaran yang semestinya diperlukan untuk perbaikan, justru dikombinasikan dengan pengalihan dana ke program-program prioritas Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap beliau tidak memiliki urgensi ekonomi.

Karunia Haganta, S.Sos juga mengungkapkan paradoks utama antara narasi pemerintah yang ingin mandiri dengan program-program sosial penting seperti

pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara justru mengalami pemotongan drastis. Akibatnya, lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bergantung pada dana pemerintah akhirnya beralih ke sumber pendanaan asing, yang kemudian dengan mudahnya pemerintah melabeli sebagai “antek-antek asing” ujar Karunia Haganta, S.Sos.

Beliau pun menegaskan terkait “secara fiskal, Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif sehat dengan defisit sebesar 2,92% pada tahun 2025, di bawah rekomendasi IMF sebesar 3%. Namun, di sisi lain, masyarakat, khususnya kelas menengah dan bawah sedang menghadapi apa yang dapat disebut sebagai krisis biaya hidup, yang tercermin dari kenaikan biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Jenis krisis ini tidak tercermin langsung dalam indikator fiskal negara, tetapi sangat memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan *austerity*.

Dalam konteks ini, efisiensi anggaran bukannya mengatasi krisis yang dialami masyarakat, justru sebaliknya. Efisiensi justru memfokuskan pengurangan pada dana-dana yang seharusnya diperlukan masyarakat seperti jaminan sosial, BPJS, beasiswa, dan subsidi pendidikan gratis. Sebagai gantinya, anggaran dialihkan ke program MBG dengan anggaran ratusan triliun rupiah yang mendominasi alokasi kementerian pendidikan dan menggantikan dana untuk beasiswa atau perbaikan infrastruktur sekolah. Data menunjukkan bahwa besaran pemangkasan anggaran Kemendiknas mencapai Rp 14,3 triliun dari pagu Rp 56,6 triliun (CNN Indonesia, 2025; DPR RI, 2025).

Dapat disimpulkan, kedua narasumber yang diwawancarai penulis menyatakan hal yang sama bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dapat dianggap sebagai *austerity policy*, meskipun dengan

penekanan argumentasi yang berbeda. Assoc. Prof. Dr. Muhammad Findi menekankan aspek logika ekonomi kebijakan, sementara Karunia Haganta, S.Sos menekankan kepentingan politik yang mendasarinya.

Kedua perspektif individu profesional tersebut dapat memperkuat argumen utama dalam penelitian ini bahwa salah satu penolakan mahasiswa menolak terhadap kebijakan *austerity*, yang teridentifikasi dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” yang menuntut pembatalan/pengkajian ulang terhadap kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang berakar dari Inpres tentang Efisiensi Anggaran.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok dan individu mahasiswa di Indonesia yang mendapati temuan bahwa dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” yang diinisiasi oleh masyarakat sipil, salah satunya elemen mahasiswa yang menuntut membatalkan atau mengkaji ulang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Aturan tersebut dinilai dapat memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan (*austerity*).

Lebih lanjut, skala demonstrasi “Indonesia Gelap” berskala besar yang sampai menghalangi lalu lintas publik serta komposisi peserta aksi lebih didominasi oleh mahasiswa. Selain itu, tajuk “Indonesia Gelap” mengandung simbolisasi kekhawatiran dan pesimisme terhadap masa depan Indonesia akibat dari berbagai kebijakan yang tidak pro-rakyat, salah satunya kebijakan pemangkasan (*austerity*) anggaran pendidikan dan kesehatan. Kedua hal tersebut dinyatakan berdasarkan persepsi kelompok dan individu mahasiswa di Indonesia yang terpilih dalam penelitian ini.

Para peserta dan salah satu inisiator demonstrasi “Indonesia Gelap” pun menyatakan hal yang sama bahwa mereka tidak menolak fakta bahwa ada sebagian peserta demonstrasi dari kalangan mahasiswa yang membakar ban, mencorat-coret barikade beton dengan pilox, pelemparan batu, sampah, petasan dan molotov ke polisi, tetapi hal tersebut diluar kesepakatan konsolidasi, sehingga itu lebih didasari oleh inisiatif pribadi.

B. MALAYSIA

Di sisi lain, pola yang sama terjadi di Malaysia yang menjadi salah satu negara dengan adanya isu penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity*. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber daring serta hasil wawancara dengan tiga kategori informan, yaitu kelompok mahasiswa, individu mahasiswa, dan individu profesional. Menghasilkan temuan yang menunjukkan adanya 2 jumlah massa aksi penolakan terhadap kebijakan *austerity* yang berskala kecil hingga besar, khususnya yang teridentifikasi dalam demonstrasi “#Tekan” pada 22 Juni 2025 dan “Turun Anwar” pada 26 Juli 2025.

Penyebab awal demonstrasi tersebut lebih disebabkan oleh faktor “kos sara hidup” atau beban biaya hidup yang meningkat, terutama yang disebabkan oleh adanya kebijakan yang dapat memperparah kenaikan biaya hidup, seperti kebijakan pajak penjualan dan jasa (*Sales and Service Tax/SST*) serta pemangkasan anggaran subsidi RON95.

Adapun untuk mendalami lebih dalam terkait kebijakan *austerity* di Malaysia, penulis mewawancarai 2 individu profesional yang dimulai dari pernyataan M. Fathinuddin Bin Hamdi, B.A, yang bekerja di pemerintah negara bagian Johor, menjelaskan bahwa pengumuman PM Anwar “mengejutkan” karena bertentangan

dengan janji kampanye sebelumnya. Beliau mengkonfirmasi bahwa kebijakan ini adalah *austerity* yang mana subsidi RON95 menghabiskan puluhan miliar ringgit per tahun dalam anggaran negara kini dikurangi. Pendekatan pemerintahan Anwar Ibrahim menggunakan mekanisme *targeting* daripada penghapusan total dimana subsidi difokuskan pada sekitar 85% penduduk Malaysia dalam kategori pendapatan B40 (kelompok pendapatan rendah), M40 (kelompok pendapatan menengah), dan sebagian besar T20 (kelompok pendapatan tinggi), sedangkan sekitar 15% kelompok pendapatan tinggi, pelaku usaha tertentu, dan warga negara asing tidak lagi menikmati subsidi ini.

Di samping itu, Muhammad Iman Khidir Tarmidzi, BEc selaku analis riset ekonomi di Institut Masa Depan Malaysia (MASA), yang menurutnya, meskipun Budget 2025 di dalamnya ada kebijakan *austerity*, rencana rasionalisasi subsidi bensin RON95 sebenarnya sudah ada dalam diskusi internal pemerintahan sejak administrasi sebelumnya. Apa yang membedakan pemerintahan Anwar Ibrahim adalah memiliki “kemauan politik” (*political will*) untuk melaksanakannya dengan mekanisme yang menurut M. Iman Khidir, BEc dianggap cerdas dan baik.

Mekanisme cerdas ini terletak pada cara pemerintah mengkomunikasikan dan mengeksekusi pengurangan subsidi, meski subsidi dialokasikan lebih ketat (*targeted*), harga bensin RON95 kepada warga Malaysia malah turun dari RM 2,05 menjadi RM 1,99 per liter, bukan naik. Sedangkan untuk SST tidak semua terkena pajak, tetapi pajak penjualan dan jasa tertentu saja yang terkena tarif. Kedua kebijakan tersebut berbeda dengan ekspektasi publik terhadap *austerity* yang biasanya memicu kenaikan harga atau penurunan layanan.

Konteks makroekonomi mendukung kategorisasi ini. Dokumen resmi Budget Speech 2025 menunjukkan pemerintahan Malaysia telah mengalami defisit fiskal selama 27 tahun berturut-turut, kebocoran subsidi bensin RON95 yang digunakan oleh individu kaya dan warga asing, serta pada tahun 2025 ditargetkan defisit sebesar 3,8%. Pengurangan subsidi dan peningkatan pendapatan melalui perluasan SST adalah respons langsung terhadap ketidakkeberlanjutan fiskal ini.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, secara eksplisit menyatakan bahwa “RM8 miliar yang dihemat dari subsidi lebih baik dialokasikan ke pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik” daripada menguntungkan 15% populasi dan warga negara asing”. Pendekatan ini sejalan dengan definisi akademis *austerity policy* sebagai serangkaian kebijakan ekonomi politik yang bertujuan mengurangi defisit anggaran pemerintah melalui pemotongan pengeluaran, kenaikan pajak, atau kombinasi keduanya.

Selain itu, dalam konteks jumlah peserta demonstrasi “Turun Anwar” menurut Fathinudden, B.A dan M. Iman Khidir, BEc demonstrasi ini diinisiasi oleh partai oposisi, khususnya sayap muda Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan diikuti oleh koalisi oposisi terorganisir lainnya. Estimasi jumlah peserta sangat variatif, dari pihak polisi dan beliau memperkirakan 18.000-20.000 orang, sementara klaim oposisi mencapai 300.000 hingga 500.000 peserta.

M. Fathinudden, B.A secara spesifik menjelaskan bahwa jumlah mahasiswa yang bergabung adalah minoritas yang diperkirakan sekitar 200 atau 300 mahasiswa di seluruh Malaysia dan mayoritas dari mereka adalah anggota sayap mahasiswa dari partai-partai oposisi atau yang sepaham dengan partai oposisi, seperti Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS) dan Siswa Bersatu.

Mahasiswa independen dari organisasi yang tidak berafiliasi dengan partai kebanyakan mereka tidak mau mendukung demo Turun Anwar ini, karena aksi tersebut bukan merupakan gerakan independen melainkan dari organisasi yang menentang pemerintah.

Disamping itu, M. Iman Khidir Tarmidzi, BEc memberikan perspektif tambahan tentang komposisi protes. Menurutnya, komunitas Tionghoa Malaysia menunjukkan reaksi paling keras terhadap perluasan SST, bukan terhadap rasionalisasi subsidi bensin RON95. Hal ini karena komunitas Tionghoa sebagian besar adalah pedagang yang memahami dampak ekonomi langsung dari kenaikan pajak terhadap harga barang konsumsi di pasar. Dengan kata lain, penolakan yang disuarakan demonstran mencerminkan komposisi partai dan kelompok kepentingan yang heterogen, bukan gerakan mahasiswa murni yang terorganisir berdasarkan isu-isu akademik atau kesejahteraan sosial.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok dan individu mahasiswa di Malaysia yang mendapati temuan bahwa dalam demonstrasi “Turun Anwar” yang diinisiasi oleh partai oposisi, tetapi sebagian kecil pesertanya dari elemen mahasiswa. Sedangkan dalam demonstrasi “#Tekan” inisiatornya adalah kelompok mahasiswa dari Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS), sebagaimana dinyatakan berdasarkan persepsi kelompok dan individu mahasiswa di Malaysia yang terpilih dalam penelitian ini.

Makna demonstrasi “#Tekan” dan “Turun Anwar” merupakan simbol kekecewaan yang sama terhadap PM Anwar Ibrahim yang dianggap gagal dalam membuat kebijakan ekonomi serta gagal dalam menepati janji kampanyenya. Lebih lanjut, skala demonstrasi “#Tekan” berskala kecil, tetapi demonstrasi “Turun

Anwar” berskala besar yang sampai menghalangi lalu lintas publik. Sedangkan komposisi peserta aksinya lebih didominasi oleh kelompok mahasiswa dalam demonstrasi “#Tekan” serta dalam demonstrasi “Turun Anwar” didominasi oleh masyarakat non-mahasiswa, sebagaimana dinyatakan berdasarkan persepsi kelompok dan individu mahasiswa di Malaysia yang terpilih dalam penelitian ini.



Gambar 4.1. Salah satu kelompok mahasiswa yang tidak bergabung dengan demonstrasi. (Diolah penulis, 2025)

Sebagai catatan, dalam kedua demonstrasi tersebut berlangsung sepenuhnya damai serta ada salah satu organisasi mahasiswa independen, seperti Kumpulan Mahasiswa Sosialis dan sebagian besar Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) serta Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK)² menyatakan tidak bergabung dengan demonstrasi “Turun Anwar” karena alasan tertentu, sebagaimana pernyataan resmi ketidakikutsertaannya terlihat pada **Gambar 4.1**.

C. KOMPARASI ISU PENOLAKAN MAHASISWA DI 2 NEGARA

Tabel 4. 1. Komparasi Isu Penolakan Mahasiswa di 2 Negara

Negara	Indonesia	Malaysia
Akar kebijakan <i>austerity</i>	Inpres Nomor 1 Tahun 2025	Budget Speech 2025
Target pemangkasan dan/atau peningkatan pajak	Transfer ke Daerah dan Kementerian/Lembaga salah satunya kementerian pendidikan dan kesehatan.	Anggaran subsidi bensin RON95 dan perluasan pajak penjualan dan jasa sekaligus meningkatkannya
Konteks Fiskal Makro	Di Indonesia defisit fiskal relatif lebih kecil karena defisit fiskal	Di Malaysia defisit fiskal relatif lebih besar karena defisit fiskal

² MPP dan MPPK merupakan organisasi eksekutif mahasiswa; padanannya di Indonesia adalah BEM dan BEM SI.

	pada tahun 2025 sebesar 2,92% di bawah rekomendasi ambang nasional dan internasional	pada tahun 2025 sebesar 3,7% diatas rekomendasi ambang batas nasional dan internasional
Aksi penolakan mahasiswa terhadap kebijakan <i>austerity</i> pada tahun 2025	Teridentifikasi dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” yang sebagian besar pesertanya adalah mahasiswa yang menolak terhadap pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan.	Teridentifikasi dalam demonstrasi “#Tekan” yang sebagian besar pesertanya dari kalangan Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia (GAMIS) serta demonstrasi “Turun Anwar” yang sebagian kecil pesertanya adalah mahasiswa yang menolak terhadap penyasaran subsidi RON95 dan SST
Inisiator demonstrasi	Demonstrasi “Indonesia Gelap” diinisiasi oleh masyarakat sipil salah satunya dari mahasiswa melalui BEM SI Kerakyatan dan Rakyat Bangkit.	Demonstrasi “#Tekan” diinisiasi oleh kelompok mahasiswa dari GAMIS Malaysia, lalu demonstrasi “Turun Anwar” oleh koalisi partai oposisi, yaitu Perserikatan Nasional (PN) terutama dari Parti Islam Se-Malaysia (PAS)
Unsur-unsur penolakan mahasiswa	Kritik kultural dan simbolis dalam “#Indonesia Gelap”, skala demonstrasi berskala besar yang sampai menghalangi lalu lintas publik, disertai adanya unsur kekerasan dan vandalisme.	Kritik kultural dan simbolis dalam “#Tekan” dan “Turun Anwar”, demonstrasi “#Tekan” berskala kecil yang tidak sampai menghalangi lalu lintas publik, dan demonstrasi “Turun Anwar” yang berskala besar yang sampai menghalangi lalu lintas publik.

Sumber: Diolah penulis, 2025

Berdasarkan **Tabel 4.1.** merupakan langkah awal sebelum menganalisis lebih khusus terkait isu penolakannya yang didasari oleh rumusan dan tujuan penelitiannya. Agar pembahasan nantinya lebih mengerucut maka dipedomani oleh level komparasi dari Uwe Flick, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 3.1.**

4.1.2. Dampak Penolakan Mahasiswa Terhadap Kebijakan *Austerity* di Indonesia Pada Tahun 2025

A. INDONESIA

Demonstrasi “Indonesia Gelap” pada 17-21 Februari 2025 merupakan penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* yang salah satunya diinisiasi

oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Gelombang pertama terjadi di Jakarta dengan massa dari berbagai universitas. Aksi ini dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah Indonesia.

Tuntutan mahasiswa mencakup 13 poin dengan fokus utama pada transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional serta yang dipersoalkan dalam penelitian ini yaitu tuntutan mahasiswa terhadap pembatalan atau pengkajian ulang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap sebagai upaya pemerintah dalam memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan.

Adapun, dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” pada tahun 2025, pihak pemerintah Indonesia hanya menjamin secara lisan bahwa Efisiensi Anggaran tidak akan menaikkan UKT dan tidak akan mengurangi Kuota KIP Kuliah. Namun belum ada revisi substansial terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025.

Hal tersebut dibuktikan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran serta Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 yang masih berlaku dan akan terjadi lagi efisiensi anggaran di tahun yang akan datang. Selain itu, hasil rapat Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Budaya (Kemenbud) serta hasil rapat Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi bukti dari belum adanya revisi Inpres tentang Efisiensi Anggaran pasca demonstrasi “Indonesia Gelap”.

B. MALAYSIA

Di sisi lain, demonstrasi “#Tekan” dan “Turun Anwar” merupakan penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity*. Demonstrasi “#Tekan” diinisiasi oleh Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS). Aksi penolakan atau demonstrasi terjadi di Dataran Sogo, Kuala Lumpur dengan massa dari berbagai perwakilan LSM bersama rakyat, seperti UMMAH, Gerakwanis, HARAM dan Federasi dengan estimasi peserta sebanyak 100 orang. Demonstrasi tersebut lebih didominasi oleh peserta dari Kelompok Mahasiswa, khususnya GAMIS Malaysia.

Selain itu, demonstrasi “Turun Anwar” diinisiasi oleh koalisi partai oposisi yang bernama Perserikatan Nasional (PN) salah satu partai oposisi terbesar, yaitu Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Aksi penolakan atau demonstrasi terjadi di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur dengan massa dari berbagai perwakilan masyarakat sipil, salah satunya dari mahasiswa dan peserta non-mahasiswa dengan estimasi peserta sebanyak 18.000-20.000 orang. Adapun peserta mahasiswanya hanya sebesar 200-1000 orang berdasarkan informasi dari informan dalam penelitian ini.

Sebagai catatan, tuntutan dalam demonstrasi “#Tekan” dan “Turun Anwar” yang dipersoalkan dalam penelitian ini yaitu penuntutan mahasiswa terhadap pembatalan atau kaji ulang pajak penjualan dan jasa (SST) serta menuntut batalkan pemangkasan anggaran subsidi RON95 yang dianggap sebagai upaya pemerintah dalam menekan atau membebani biaya hidup masyarakat.

Adapun, dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Malaysia pada tahun 2025 teridentifikasi dalam dua demonstrasi, yaitu demonstrasi “#Tekan” yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa GAMIS Malaysia yang

mendesak pemerintah untuk merevisi atau membatalkan SST serta demonstrasi “Turun Anwar” yang diinisiasi oleh partai oposisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasca demonstrasi “#Tekan” adanya pengumuman resmi dari Menteri Keuangan Malaysia terkait revisi butir-butir SST, seperti revisi kebijakan pajak penjualan buah import ada yang dikecualikan serta pembatalan pajak layanan kecantikan. Revisi kebijakan tersebut dipublikasikan pada 27 Juni 2025 pasca demonstrasi “#Tekan” pada 22 Juni 2025.
- 2) Sebelum demonstrasi “Turun Anwar” adanya pengumuman dari PM Anwar pada tanggal 23 Juli 2025, yaitu 3 hari sebelum demonstrasi berlangsung, PM Anwar mengumumkan paket kebijakan darurat yang dirancang untuk merespons kekhawatiran publik tentang biaya hidup. Paket ini mencakup pembayaran tunai RM100 untuk semua warga dewasa yang didistribusikan mulai 31 Agustus, peningkatan alokasi Sumbangan Rahmah dari RM13 menjadi RM15 miliar dan pengumuman bahwa harga bensin RON95 akan turun menjadi RM 1,99 per liter setelah implementasi *targeted subsidy*. Timing pengumuman ini strategis yang muncul tepat sebelum demo agar menunjukkan pemerintah responsif terhadap keluhan publik, seperti yang diutarakan oleh Iman Khidir, BEC.
- 3) Dalam demonstrasi “Turun Anwar”, pemerintah Anwar Ibrahim mengizinkan demonstrasi berlangsung secara damai tanpa gangguan polisi. Faktanya, lebih dari 2.000 personel polisi disiagakan untuk menjaga keamanan, bukan untuk membubarkan atau membatasi aksi. PM Anwar secara publik menyatakan bahwa pemerintahnya menyambut kritik dan berkumpul secara damai dan ini adalah pertama kalinya demonstrasi berlangsung tanpa gangguan dari polisi.

Strategi ini diperhitungkan dengan cermat dengan mengizinkan demo berlangsung, PM Anwar mempresentasikan dirinya sebagai pemimpin yang demokratis dan percaya diri, jauh berbeda dari gambaran otoritarian yang dipromosikan oleh oposisi.

- 4) Pasca Demonstrasi “Turun Anwar”, M. Iman Khidir Tarmidzi., BEc menjelaskan terkait keberhasilan pemerintah Malaysia dalam membingkai ulang narasi. Jumlah peserta yang diperkirakan polisi hanya 18.000 jauh lebih rendah dari klaim resmi oposisi sebesar 300.000 peserta dan ini dikemas pemerintah sebagai bukti bahwa oposisi gagal menggerakkan massa secara masif. M. Iman Khidir Tarmidzi., BEc mencatat bahwa “Tingkat partisipasi yang rendah melemahkan klaim oposisi tentang kemarahan yang meluas dan memudahkan pemerintah untuk mengecilkan dampak peristiwa tersebut.” Pemerintah juga menonjolkan kondisi damai di lapangan sebagai bukti kedewasaan demokrasi dan kestabilan institusional Malaysia, narasi yang sangat berharga untuk menarik investor asing.
- 5) Pada Juli hingga September 2025. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil secara langsung merespons pada demonstran, yang menjanjikan “Komunikasi pemerintah yang lebih kuat dengan publik” di masa depan. Lebih penting lagi, PM Anwar mengumumkan kembali dan mengklarifikasi kebijakan subsidi bensin RON95 pada 22 September 2025 setelah demo dengan detail program “Budi Madani 95” (BUDI95) yang lebih inklusif dari rencana awal. Alih-alih membatasi subsidi hanya untuk T20/M40/B40, program yang diumumkan mencakup semua warga Malaysia berusia 16 keatas dengan SIM yang valid, dengan limit 300 liter tiap bulan tiap orang. Timing pengumuman ini sekitar

dua bulan setelah demo yang menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah dirancang untuk menjaga momentum positif sambil menghindari kesan terburu-buru atau terpengaruhi tekanan demonstrasi “Turun Anwar”.

Dapat disimpulkan, pasca demonstrasi “Turun Anwar” memiliki “indikasi dampak parsial” dalam merevisi kebijakan pemangkasan anggaran subsidi RON95 dari RM 8 miliar menjadi RM 2.5 miliar berdasarkan Budget Speech 2025 dan Budget Speech 2026. Sedangkan dalam demonstrasi “#Tekan” memiliki “indikasi dampak parsial” dalam merevisi beberapa butir kebijakan SST, seperti pajak penjualan buah import yang dikecualikan seperti apel, jeruk, jeruk mandarin, dan kurma, lalu ada pembatalan pajak layanan jasa kecantikan seperti manikur, pedikur, perawatan wajah, dan pangkas rambut berdasarkan dokumen Media Release Ministry Of Finance (MOF) Malaysia yang dipublikasikan pada tanggal 27 Juni 2025.

D. KOMPARASI DAMPAK PENOLAKAN MAHASISWA DI 2 NEGARA

Tabel 4. 2. Komparasi Dampak Penolakan Mahasiswa di 2 Negara

Negara	Indonesia	Malaysia
Respon Pemerintah	Belum direspons secara substansial terkait kebijakan efisiensinya. Hanya jaminan lisan bahwa Efisiensi tidak akan mengancam UKT naik dan kuota KIP Kuliah	Direspons dengan cepat 3 hari sebelum demonstrasi “Turun Anwar”, serta dalam demonstrasi “#Tekan” pemerintah merespon dengan merevisi SST sebagai masukan dari publik bersama masukan dari industri.
Dampak pada Kebijakan	Belum berdampak dalam membatalkan atau merevisi kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan yang dibuktikan dengan Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran masih berlanjut pada tahun 2026	Memiliki indikasi dampak parsial dalam merevisi kebijakan SST pasca demonstrasi “#Tekan” serta merevisi pemangkasan anggaran subsidi RON95 pasca demonstrasi “Turun Anwar”, tetapi tanpa membatalkan kebijakan inti.

Sumber: Diolah penulis, 2025

Berdasarkan **Tabel 4.2.** merupakan langkah awal sebelum menganalisis lebih khusus terkait dampak penolakannya yang didasari oleh rumusan dan tujuan

penelitian. Agar pembahasan nantinya lebih mengerucut maka dipedomani oleh level komparasi dari Uwe Flick, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

4.2. Pembahasan Komparatif dari Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Isu Penolakan Mahasiswa Terhadap Kebijakan *Austerity* Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia Pada Tahun 2025

A. INDONESIA

Sebelum membahas bentuk penolakan mahasiswanya, perlu adanya gambaran umum terkait kebijakan *austerity* di Indonesia yang dimulai pada 22 Januari 2025. Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran. Total efisiensi yang direncanakan mencapai Rp750 triliun yang akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama dituangkan secara eksplisit dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dengan target efisiensi sebesar Rp306,7 triliun, salah satunya memangkas sebesar Rp256,1 triliun pada anggaran Kementerian/Lembaga.

Namun, hal tersebut menuai berbagai penolakan dari masyarakat sipil, salah satunya dari elemen mahasiswa dalam aksi “Indonesia Gelap” yang menuntut untuk mencabut atau mengkaji ulang Inpres No. 1 Tahun 2025 karena ketidakpuasan terkait langkah-langkah penghematan (*austerity*), pendidikan, dan distribusi kekuasaan (Tim detikfinance, 2025; Jati et al., 2025).

Di samping itu, penulis telah melakukan wawancara secara daring kepada pakar ekonomi politik dan kebijakan publik yang menyatakan bahwa:

“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dapat dianggap sebagai kebijakan penghematan (*austerity policy*). Meskipun amanat konstitusi 20% APBN untuk pendidikan, faktanya anggaran pendidikan tetap mengalami penyusunan/pengurangan belanja yang signifikan. Sektor kesehatan juga mendapat efisiensi anggaran di APBN 2025.” (Assoc. Prof. Dr. Muhammad Findi)

Di sisi lain, penulis telah melakukan wawancara secara daring kepada peneliti independen yang mengkaji *austerity* yang menyatakan bahwa:

“Narasi pemerintah yang menyebut efisiensi anggaran adalah *refocusing* anggaran dan bukan pemangkasan anggaran (*austerity*) dianggap tidak rasional, karena gaji pejabat tetap besar, sementara sektor lain dipotong, *refocusing* anggaran justru diarahkan ke program MBG yang dinilai tidak memiliki urgensi dan mengorbankan sektor yang sedang sangat dibutuhkan seperti pendidikan dan kesehatan.” (Karunia Haganta)

Selain itu, menurut Riandy Laksono, PhD selaku peneliti di Departemen Ekonomi, Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) menyatakan:

“Klaim pemerintah memerlukan efisiensi anggaran untuk mendanai program renovasi sekolah di seluruh kepulauan di Indonesia tidak berdasar, dikarenakan bertentangan dengan struktur anggaran baru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipangkas sebesar Rp 8 triliun, jadi klaim awal pemerintah sebagai “langkah efisiensi” bisa berubah menjadi ‘kebijakan *austerity*’, yang mengakibatkan pengetatan fiskal secara keseluruhan.” (Laksono, 2025)

Selaras dengan hal tersebut, Gede Sandra selaku peneliti di Lingkar Studi Perjuangan (LSP) menyatakan bahwa

“Sulit untuk melihat apa yang ‘rasional’ dari pemotongan belanja sebesar Rp 300 triliun ketika ada Rp 450 triliun dana pemerintah (SAL) yang menganggur di Bank Indonesia. Alih-alih menyuntikkan uang itu ke dalam perekonomian, menjaganya tetap berputar di bisnis dan rumah tangga, logika ekonomi lama memilih *austerity*.” (Sandra, 2025)

Namun, pernyataan dari Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Februari 2025 menyatakan:

“Tidak ada pengurangan total belanja negara, yang ada *refocusing*”, kemudian menyebut postur belanja negara tahun 2025 masih tetap, yaitu sebesar Rp 3.621,3 triliun.” (Sri Mulyani dalam Rengganis, 2025)

Selain itu, terdapat pernyataan dari Dedi Mulyadi dalam acara pelantikan Kepala Daerah Seluruh Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 dia menyatakan:

“Efisiensi anggaran bukan potong anggaran, tetapi mengalihkan belanja dari yang tidak penting menjadi penting (Dedi Mulyadi dalam Kompas TV Jember, 2025).”

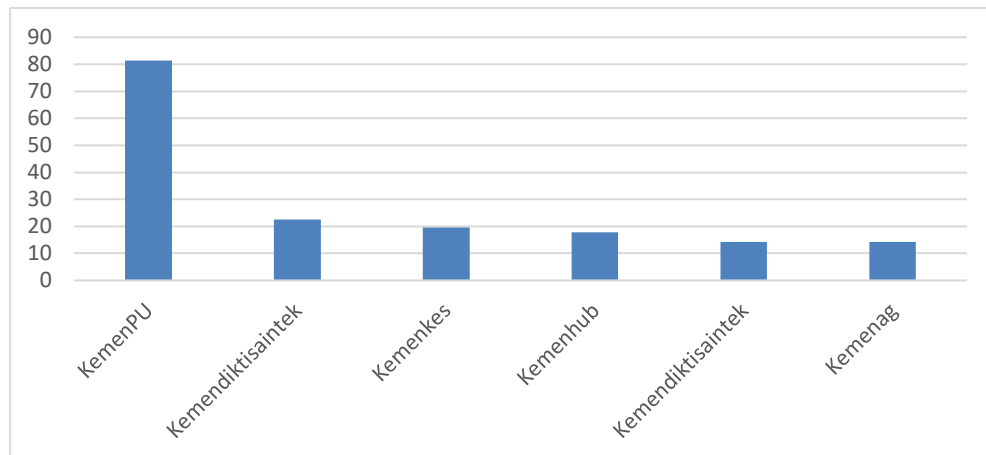
Akan tetapi, secara objektif penulis menyatakan bahwa pernyataan dari kedua pejabat publik itu tidak bisa dianggap salah, tetapi mempunyai kebenarannya masing-masing, memang benar postur APBN 2025 tetap Rp 3.621,3 triliun serta efisiensi anggaran memang dialihkan ke belanja yang dianggap penting pemerintah.

Namun, tidak menampik fakta bahwa ada pemangkasan pagu pada sektor-sektor penting, seperti dugaan anggaran pendidikan dipangkas Rp 71 triliun yang dialihkan ke belanja Makan Bergizi Gratis (MBG), anggaran Kemendikisaintek dipangkas menjadi Rp 14,3 triliun dan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dipangkas Rp 19,63 triliun, sehingga klaim “bukan pemangkasan” secara teknis benar, tetapi menyesatkan karena menyembunyikan pemangkasan riil pada layanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menarik kesimpulan sementara bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dapat dianggap sebagai *austerity policy* dengan narasi “efisiensi”, hal ini dapat dianalisis lebih dalam melalui dimensi substansi kebijakannya berdasarkan kerangka teori *austerity* Alesina et al., (2019), yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi Substansi Kebijakannya

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran telah memenuhi unsur pemangkasan belanja publik. Hal tersebut dibuktikan dengan data pada **Gambar 4.2**.



Gambar 4.2. Kementerian/Lembaga Paling Terdampak Efisiensi Anggaran per 12 Februari 2025 Berdasarkan Nominal. Sumber: (Wafa, 2025; DPR RI, 2025)

Berdasarkan **Gambar 4.2.** yang menunjukkan bahwa pagu anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikisaintek) berada di peringkat ke-2 berdasarkan rencana awal pemangkasan anggaran sebesar Rp 22,46 triliun, tetapi per 12 Februari 2025 berubah menjadi Rp 14,3 triliun yang berada di peringkat ke-5, sementara pagu anggaran Kementerian Kesehatan berada di peringkat ke-3 yang terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 19,63 triliun. Di samping itu, menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh pada tanggal 6 Januari 2025 menyampaikan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah disetujui senilai Rp 71 triliun, kemudian Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional menambahkan bahwa anggaran MBG akan masuk ke dalam APBN 2025 (Janati & Carina, 2025).

Hal tersebut memperkuat kekhawatiran Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 30 Agustus 2024 yang menduga bahwa rencana anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun akan memangkas anggaran pendidikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenaikan anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar Rp 54,4 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Sebagai catatan, presiden sebelumnya membentuk Badan Gizi Nasional yang diduga untuk mempersiapkan pengelolaan MBG.

Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan penurunan alokasi anggaran untuk Program Indonesia Pintar yang menurun dari 20,8 juta pada 2024 menjadi 20,4 juta siswa pada tahun 2025 dan Tunjangan Profesi Guru non PNS menurun dari 577,7 ribu pada 2024 menjadi 477,7 ribu pada tahun 2025. Lalu, berdasarkan RAPBN 2025 program MBG penerimanya tidak hanya peserta didik dari SD hingga SMA, tetapi diperluas penerimanya mulai dari anak balita dan ibu hamil atau menyusui berisiko anak *stunting*.

Menilai hal tersebut, ICW menduga bahwa total anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar Rp 722,6 triliun berpotensi berkurang menjadi Rp 651,61 triliun atau sekitar 18% dari total APBN 2025 apabila MBG dimasukkan ke dalam fungsi pendidikan. Dugaan tersebut, menunjukkan bahwa sumber anggaran MBG belum diungkapkan secara transparan, karena pemerintah hingga saat ini belum mengungkapkan transparansi sumber anggaran MBG.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan, maka penulis merujuk ke dalam teori *austerity* dari Alesina et al. (2019), bahwa Inpres No. 1 Tahun 2025 memiliki jenis *expenditure-based austerity*, karena mengandung pemangkasan belanja publik dan pengalihan sumber daya dari program pendidikan dan kesehatan ke program prioritas lain, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sejalan dengan data pemangkasan anggaran Kemendiknas sebesar Rp 14,3 triliun dan Kemenkes dipangkas sebesar Rp 19,63 triliun pada tahun 2025 serta kekhawatiran lembaga seperti ICW yang menilai MBG sebesar Rp71 triliun “diduga dimasukkan” ke dalam

fungsi pendidikan serta berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi program pendidikan lainnya.

Selaras dengan uraian sebelumnya, maka aksi penolakan mahasiswa di Indonesia terhadap kebijakan *austerity* dapat diidentifikasi dari tuntutan yang menolak terhadap kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan, adapun poin tuntutan dari BEM SI Kerakyatan yang diidentifikasi sebagai penolakan terhadap kebijakan *austerity*, yaitu: (1) Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran Pendidikan; (6) Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, aturan ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan, tuntutan dari BEM SI Rakyat Bangkit yang menolak terhadap kebijakan *austerity*, yaitu: (1) Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dihubungkan dengan reduksi hasil wawancara dalam penelitian subbab 4.1.1, yang dapat disimpulkan bahwa, dalam ruang lingkup penelitian ini, penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Indonesia pada tahun 2025 teridentifikasi khususnya dalam demonstrasi “Indonesia Gelap”. Hal ini karena tuntutan terkait pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dikaji dalam penelitian ini muncul secara paling jelas dan eksplisit dalam demonstrasi tersebut.

Adapun, kebijakan yang dituntut dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” dalam skripsi ini diidentifikasi sebagai *austerity* yanguntutannya berasal dari BEM SI Kerakyatan dan BEM SI Rakyat Bangkit, yang notabene kedua BEM tersebut menjadi salah satu inisiator dalam demonstrasi “Indonesia Gelap”. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Instruksi Indonesia Gelap; Aksi Serentak Di

Daerah dan Aksi Nasional dari BEM SI Rakyat Bangkit yang menjadi salah satu inisiator demonstrasi tersebut sebagaimana terlihat pada **Gambar 4.3**.



Gambar 4.3. Surat Instruksi Indonesia Gelap serta Penyerahan Surat Tuntutan ke Mensesneg. (Diolah penulis, 2025)

Namun, perlu ditegaskan kembali bahwa demonstrasi “Indonesia Gelap” tidak hanya diinisiasi oleh mahasiswa. Seperti telah dijelaskan dalam subbab 4.1.1, inisiator awal berasal dari masyarakat sipil. Meskipun demikian, peserta demonstrasi pada akhirnya didominasi oleh mahasiswa.

Adapun, bentuk-bentuk penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Indonesia pada tahun 2025 berdasarkan penggalan hasil wawancara dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Resistensi tidak kentara, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur kritik kultural dan/atau simbolis salah satunya berupa tagar #Indonesia Gelap dan logo burung Garuda yang diwarnai hitam penuh, pembuktiannya didasarkan pada penggalan hasil wawancara di bawah ini:

“Indonesia Gelap secara terminologis adalah simbol yang menyimpulkan kekhawatiran akan masa depan di Indonesia... Indonesia akan dihujani pesimisme terhadap beberapa masalah-masalah di negeri ini.” (Satria Naufal Putra Ansar)

“Indonesia Gelap itu adalah puncak dari ketidakpercayaan masyarakat sipil serta ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan sistem untuk memenuhi hajat hidup dari masyarakat Indonesia.” (Ridho Anwari Aripin)

“Indonesia Gelap itu ya memang tagarnya adalah simbolis. Tapi maknanya sangat dalam. Bahwa burung Garuda yang menjadi lambang negara itu diwarnai hitam semua. Dan itu menandakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.” (Muhammad Fitrah Aryo Ahsari)

“Logo Garuda dengan latar belakang hitam disertai tagar #IndonesiaGelap yang melambangkan keresahan mendalam yang mengindikasikan Indonesia sedang menuju 'era kegelapan' akibat kebijakan yang tidak pro-rakyat, bukan lagi menuju 'Indonesia Emas.'” (Adhwa Hanifa)



Gambar 4.4. Resistensi Tidak Kentara dengan Tajuk dan Tagar “Indonesia Gelap”. (Diolah penulis, 2025)

Dapat disimpulkan, berdasarkan penggalan hasil wawancara kepada informan kelompok dan individu mahasiswa di Indonesia bahwa dalam demonstrasi “IndonesiaGelap” adanya bentuk resistensi tidak kentara yang disimbolisasikan oleh inisiator dan peserta demonstrasi tersebut, salah satunya berupa tagar dan tajuk seperti terlihat pada **Gambar 4.4.**

- 2) Penentangan publik mengganggu, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur demonstrasi berskala besar yang sampai menghalangi lalu lintas publik, pembuktiannya didasarkan pada penggalan hasil wawancara di bawah ini:

“Ini sih cukup skala besar karena juga pihak polisi juga melakukan rekayasa jalanan lalu lintas ya, kedua juga eskalasi masanya juga se-Indonesia, di Jakarta juga rame dipatung kuda bahkan berhari-hari bahkan kalau eskalasi medianya sampai internasional.” (Satria Naufal Putra Ansar)

“Kita demo di depan Patung Kuda yang mana dekat dengan Istana Negara itu besar sekali dan sampai menghalangi lalu lintas publik.” (Ridho Anwari Aripin)

“Untuk yang di Patung Kuda itu bisa dianggap berskala besar sampai jalanan diblokade pemerintah oleh barikade beton.” (M. Fitrah Aryo Ahsari)

“Dari tempat kita parkir sampai Patung Kuda, sampai ke titik aksi, itu tuh sangat macet banget atau bisa dibilang penuh dengan masyarakat. Dan bisa dibilang itu aksi yang sangat besar.” (Adhwa Hanifa)



Gambar 4.5. Demonstrasi berskala besar yang menghalangi lalu lintas publik. (Diolah penulis, 2025)

Dapat disimpulkan, berdasarkan penggalan hasil wawancara kepada informan kelompok dan individu mahasiswa di Indonesia bahwa dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” adanya bentuk penentangan publik yang mengganggu, dikarenakan adanya demonstrasi berskala besar dan sampai menghalangi lalu lintas publik di sekitaran kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sebagaimana terlihat pada **Gambar 4.5**.

- 3) Penolakan militan, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur vandalisme dan unsur kekerasan, pembuktiannya didasarkan pada penggalan hasil wawancara di bawah ini:

“Seingat saya ada waktu itu cuma sampai bakar ban aja sih sama paling pilox-pilox itu pun diluar daripada kesepakatan konsolidasi jadi itu inisiatif pribadi dari teman-teman salah satu elemen atau salah satu organ yang ikut.” (Satria Naufal Putra Ansar)

“Ada aksi vandalisme berupa coretan dengan pilox di beton barikade. Namun ketika hari sudah malam, waktunya di maghrib, Itu memang ada aksi kekerasan, seperti pelemparan batu, petasan serta molotov.” (Ridho Anwari Aripin)

“Barikade beton itu banyak ditulis. Mungkin pilox dari masa aksi di sana dengan narasi-narasi propaganda untuk melawan kebijakan pemerintah. Lalu, waktu itu terdapat pelemparan batu, pelemparan sampah bekas makanan ke polisi yang jaga pada saat itu, membakar ban.” (M. Fitrah Aryo Ahsari)

“Kita ngelempar sampah ke dalam istana, terus juga ngelempar barang-barang ke dalam batas-batas dari patung kuda ke istana. Lalu, aksi-aksi melempar barang sampai petasan dan lain sebagainya.” (Adhwa Hanifa)



Gambar 4.6. Penolakan Militan dalam demonstrasi “Indonesia Gelap”.
(Diolah penulis, 2025)

Dapat disimpulkan, berdasarkan penggalan hasil wawancara kepada informan kelompok dan individu mahasiswa di Indonesia bahwa dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” adanya bentuk penolakan militan, dikarenakan terpenuhinya unsur vandalisme seperti mencorat-coret barikade beton dengan pilox serta terpenuhinya unsur kekerasan seperti membakar ban, melempar sampah, melempar batu, melempar petasan, dan melempar bom molotov ke petugas kepolisian, sebagaimana salah satu adegannya bisa dilihat pada **Gambar 4.6**. Sebagai catatan, bentuk penolakan ini disepakati bersama oleh informan mahasiswa bahwa itu merupakan inisiatif pribadi yang diluar kesepakatan konsolidasi.

B. MALAYSIA

Di sisi lain, penulis juga merasa perlu untuk menjelaskan secara umum terkait kebijakan *austerity* yang muncul di Malaysia, yang dimulai pada tanggal 26 Februari 2024, Raja Malaysia yaitu Sultan Ibrahim Iskandar telah menyampaikan pidato kerajaan dalam Rapat Pertama Sesi Ketiga Parlemen ke-15 di Dewan Rakyat Kuala Lumpur yang mendukung langkah pemerintah untuk segera mengambil tindakan penghematan atau *austerity*, termasuk menerapkan subsidi yang ditargetkan. Hal ini mengingat defisit fiskal di Malaysia tidak berujung surplus sejak tahun 1998 serta pemerintah Malaysia berkomitmen dalam mengurangi defisit fiskal menjadi 3,8 persen pada tahun 2025.

Oleh sebab itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyusun proposal yang bernama Budget Speech 2025 atau Belanjawan 2025 yang disampaikan secara resmi di parlemen Malaysia pada tanggal 18 Oktober 2024 terkait rencana anggaran pada tahun 2025. Namun, hal tersebut menuai berbagai penolakan dari masyarakat salah satunya dari elemen Mahasiswa yang menolak terhadap perluasan SST serta penyasaran subsidi (MalayMail, 2024; Astro Awani, 2025; PMO Malaysia, 2024).

Di samping itu, penulis telah melakukan wawancara secara daring kepada analis ekonomi regional Malaysia dari Institut MASA yang menyatakan bahwa:

“Rasionalisasi subsidi bensin RON95 boleh dikatakan sebagai *austerity policy* karena memangkas anggaran subsidi bagi 15% warga negara Malaysia serta warga negara asing, lalu adanya perluasan sekaligus kenaikan *sales and service tax* (SST)” (M. Iman Khidir Tarmidzi, BEc)

Di sisi lain, penulis telah melakukan wawancara secara daring kepada analis kebijakan urusan publik dari pemerintah negara bagian Johor, Malaysia yang menyatakan bahwa:

“Ya, benar. Ini adalah kebijakan *austerity* yang mana subsidi bensin RON95 ditargetkan untuk 85% warga negara Malaysia, lalu ada kenaikan SST” (M. Fathinuddin Bin Hamdi, B.A)

Selain itu, penulis menggunakan hasil wawancara MalayMail kepada Assoc. Prof. Dr Azmil Tayeb dan Dr. Nur Ameera A Jaz yang menyatakan hal yang sama bahwa kebijakan rasionalisasi subsidi bensin RON95 dan perluasan SST merupakan langkah-langkah penghematan (*austerity measures*) dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim (MalayMail, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa rasionalisasi subsidi bensin RON 95 serta pajak penjualan dan pajak jasa (*Sales and Service Tax*) merupakan kebijakan *austerity*, hal ini dapat dianalisis melalui dimensi substansi kebijakan *austerity* dari Alesina et al., (2019), yaitu sebagai berikut:

1) Dimensi Substansi Kebijakannya

Budget Speech 2025 merupakan sebuah proposal yang menjadi akar dari kebijakan rasionalisasi subsidi RON95 serta perluasan SST. Berdasarkan dokumen Budget Speech 2025 pada poin ke-52 yang berbunyi:

“Wealthy individuals, foreign nationals and businesses, constituting 15% of consumers, disproportionately benefit from 40% of the RON95 subsidy, amounting to 8 billion ringgit. It must be emphasised that the 8 billion ringgit saved from this leakage will be rechannelled towards improving education and healthcare facilities, as well as public transportation.”

Berdasarkan poin ke-52 dalam dokumen tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi subsidi bensin RON95 akan menargetkan pemangkasan bagi 15% konsumen subsidi bensin RON95 dari individu kaya, warga negara asing dan bisnis. Dalam Budget Speech 2025 juga tertulis bahwa total anggaran subsidi bensin RON95 pada tahun 2023 sebesar RM 20 miliar yang akan dipangkas sebesar RM 8 miliar atau 40% dari total anggaran

subsidi bensin RON95, hasil pemangkasan tersebut menurut PM Anwar akan dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.

Selain itu, adanya perluasan dan kenaikan tarif pajak penjualan sebesar 5 hingga 10% atau tarif tertentu tergantung pada jenis barangnya. Sedangkan tarif pajak jasa sebesar 6 hingga 10% atau tarif tertentu tergantung pada jasa yang diberikan. Hal ini menegaskan bahwa dalam satu dokumen Budget Speech 2025 memenuhi kerangka teori *austerity* dari Alesina et al. (2019) dengan jenis *expenditure and tax-based austerity*, yang dibuktikan dengan adanya konsolidasi fiskal melalui pemangkasan anggaran subsidi RON95 bagi 15% konsumen serta memperluas sekaligus meningkatkan tarif pajak penjualan dan jasa (SST).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, aksi penolakan mahasiswa di Malaysia pada tahun 2025 ada dua demonstrasi yang menolak terhadap kebijakan *austerity*, hal ini dapat diidentifikasi dari tuntutan mereka, yang pertama dalam demonstrasi “#Tekan” menuntut pemerintah Malaysia agar membatalkan SST, yang kedua dalam demonstrasi “Turun Anwar” yang sebagian kecil pesertanya adalah mahasiswa menuntut kos sara hidup atau beban biaya hidup yang akan disebabkan oleh penyasaran subsidi (termasuk subsidi RON95) serta SST, seperti halnya pernyataan dari perwakilan kelompok mahasiswa yaitu M. Azamuddin Bin Sahar selaku Presiden GAMIS Malaysia koordinator demonstrasi “#Tekan” serta yang memobilisasi mahasiswa untuk ikut demonstrasi “Turun Anwar”.

Sejalan dengan konteks aksi penolakan mahasiswa di Malaysia, demonstrasi “#Tekan” diikuti oleh hampir 100 peserta, yang terdiri atas mahasiswa dan masyarakat umum. Aksi tersebut digerakkan oleh GAMIS selaku inisiator.



Gambar 4.7. Demonstrasi #Tekan serta Demonstrasi Turun Anwar Pada Tahun 2025. (Diolah penulis, 2025)

Hal tersebut dikonfirmasi kevalidannya berdasarkan hasil wawancara dengan Presiden GAMIS Malaysia serta mahasiswa yang paham betul mengenai fakta demonstrasi yang terjadi di Malaysia, seperti yang telah dibahas pada subbab 4.1.1, sedangkan estimasi peserta demonstrasi Turun Anwar sebanyak 18.000-20.000 peserta yang kurang lebih 200-1000 orang adalah mahasiswa serta dokumentasi pada **Gambar 4.7.** yang menunjukkan adanya koordinasi dari GAMIS Malaysia terhadap demonstrasi “#Tekan” serta dukungan dari GAMIS Malaysia terhadap demonstrasi “Turun Anwar”.

Selain itu, bentuk penolakan mahasiswa di Malaysia terhadap kebijakan *austerity* pada tahun 2025 berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Resistensi tidak kentara, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur kritik kultural dan/atau simbolis, salah satunya berupa tagar dan tajuk “#Tekan” dan #Turun Anwar, pembuktiannya didasarkan pada penggalan hasil wawancara di bawah ini:

“Simbol #Tekan dan #TurunAnwar merupakan kritik dan kekecewaan masyarakat Malaysia terhadap pemerintahan PM Anwar Ibrahim yang tidak menepati janji-janji kampanye, salah mengelola ekonomi seperti memangkas subsidi RON 95 dan perluasan SST, kalau mengikuti sejarah semasa PM anwar menjadi

oposisi dia sering mengkritik kenaikan pajak, tetapi sekarang malah menaikkan pajak.” (M. Azamuddin Bin Sahar)

“Demonstrasi ‘Turun Anwar’ mengandung simbol kemarahan salah satunya terhadap kebijakan SST dan pemangkasan subsidi RON95 yang menurut mereka telah gagal dalam berkebijakan ekonomi.” (M. Fathinudden Bin Hamdi)

“Tajuk ‘Turun Anwar’ merupakan kemarahan pihak oposisi pada langkah-langkah penghematan Anwar Ibrahim atas perluasan pajak tersebut.” (M. Iman Khidir Tarmidzi)

“Frasa demo 'Turun Anwar' mengandung unsur kritik simbolis yang kuat, bukan hanya tuntutan pengunduran diri, tetapi juga simbol penolakan terhadap janji-janji reformasi yang dianggap tidak terpenuhi dan kekecewaan generasi muda terhadap kebijakan ekonomi.” (Andi Aishwaryanizatul Azwa)



Gambar 4.8. Resistensi Tidak Kentara Dalam Kedua Demonstrasi di Malaysia. (Diolah penulis, 2025)

Dapat disimpulkan, berdasarkan penggalan hasil wawancara kepada kelompok dan individu mahasiswa di Malaysia bahwa dalam demonstrasi “#Tekan” dan “TurunAnwar” adanya bentuk resistensi tidak kentara yang disimbolisasikan inisiator dan pengamat demonstrasi tersebut, salah satunya berupa tajuk dan tagar, sebagaimana terlihat pada **Gambar 4.8**.

- 2) Penentangan publik tidak mengganggu, hal ini dibuktikan dalam demonstrasi “#Tekan” yang terpenuhinya unsur demonstrasi berskala kecil sebanyak 100 orang peserta yang didominasi kelompok mahasiswa dari GAMIS Malaysia bersama warga sipil lainnya yang tidak sampai menghalangi lalu lintas publik di kawasan Dataran Sogo, Kuala Lumpur,

Malaysia, pembuktiannya didasarkan pada wawancara dengan Presiden GAMIS Malaysia dan dokumentasi berupa foto pada **Gambar 4.9**.



Gambar 4.9. Demonstrasi “#Tekan” yang diinisiasi oleh GAMIS Malaysia.
(Sumber: Dokumentasi GAMIS Malaysia, 2025)

- 3) Penentangan publik mengganggu, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur demonstrasi berskala besar yang sampai menghalangi lalu lintas publik seperti halnya dalam demonstrasi Turun Anwar yang sebagian kecil pesertanya merupakan Mahasiswa, pembuktiannya didasarkan pada penggalan hasil wawancara di bawah ini:

“Dia mengganggu lalu lintas umum. Dan saya katakan ini adalah masalah berskala besar. Jika kita menggabungkan semua peserta, jumlah total peserta bisa mencapai 20.000. 10%-15% dari jumlah itu adalah mahasiswa atau pelajar. Perkiraan jumlah mahasiswa adalah 1.000-1.500, kurang lebih. Ini berdasarkan perkiraan yang telah kami susun bersama beberapa organisasi non-pemerintah.”
(M. Azamuddin Bin Sahar)

“Demonstrasi Turun Anwar dihadiri oleh sekitar 18 hingga 20 ribu orang. Jumlah mahasiswa, menurut saya, adalah minoritas, diperkirakan sekitar 200 atau 300 mahasiswa yang ikut.” (M. Fathinuddin Bin Hamdi)

“Demonstrasi ‘Turun Anwar’ dapat dikategorikan sebagai demonstrasi berskala besar, melibatkan ribuan peserta dan untuk sementara waktu mengganggu lalu lintas umum di beberapa wilayah utama Kuala Lumpur serta pesertanya lebih banyak yang bukan mahasiswa.” (Andi Aishwaryanizatul Azwa)



Gambar 4.10. Penentangan Publik Mengganggu dalam Demonstrasi “Turun Anwar”. (Reuters: Hussain, 2025)

Dapat disimpulkan, berdasarkan penggalan hasil wawancara kepada informan kelompok dan individu mahasiswa di Malaysia bahwa dalam demonstrasi “Turun Anwar” dapat dianggap penentangan publik mengganggu karena berskala besar dengan estimasi peserta mahasiswanya 200-1000 orang yang berkontribusi dalam menghalangi lalu lintas publik di kawasan Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia, sebagaimana terlihat pada **Gambar 4.10**.

4.2.2. Analisis Dampak Penolakan Mahasiswa Terhadap Kebijakan *Austerity* Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia Pada Tahun 2025

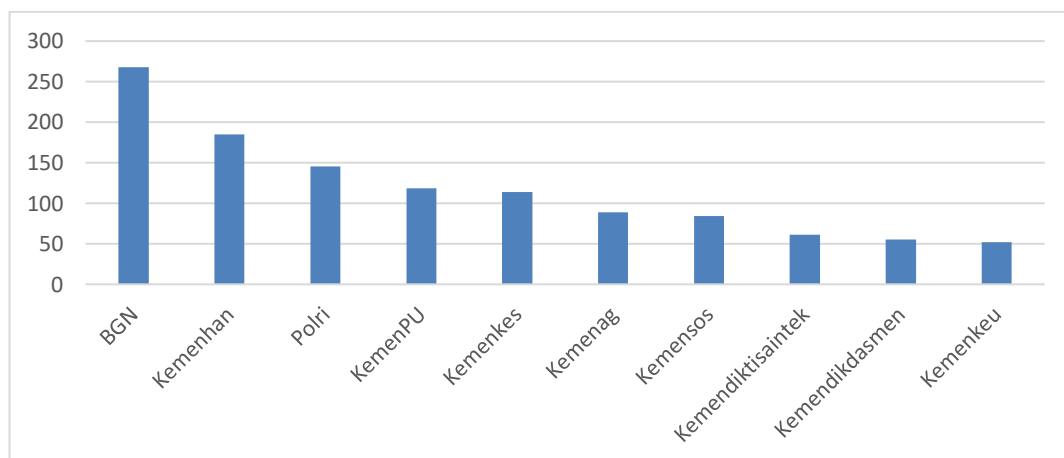
A. INDONESIA

Dampak penolakan mahasiswa di Indonesia terhadap kebijakan *austerity* dapat ditelusuri dalam tuntutan mereka, yaitu: (1) Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran Pendidikan; (6) Cabut Instruksi/Kaji ulang Presiden Nomor 1 Tahun 2025, aturan ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan tuntutan dari mahasiswa tersebut dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” yang diselenggarakan pada 17-21 Februari 2025 belum berdampak dalam membatalkan ataupun mengkaji ulang efisiensi anggaran.

Hal ini dibuktikan dengan masih berlakunya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 2 Ayat (1-3) yang berbunyi:

“(1) Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas Pemerintah, Pemerintah melakukan penyesuaian belanja negara melalui efisiensi belanja dalam APBN. (2) Efisiensi belanja dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga; dan b. efisiensi TKD. (3) Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

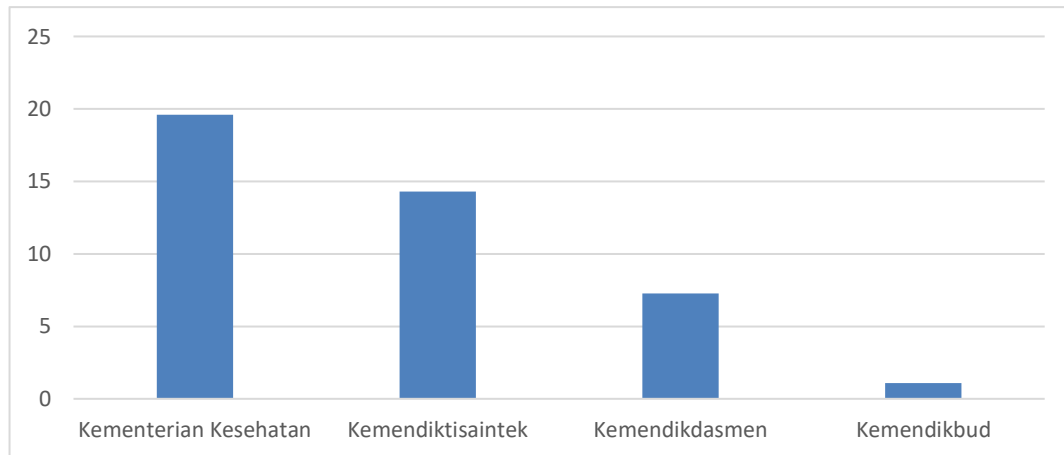
Berdasarkan kedua regulasi tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia akan melaksanakan lagi efisiensi anggaran untuk tahun yang akan datang, lalu diperkuat juga dengan data pada **Gambar 4.11**.



Gambar 4.11. 10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar berdasarkan RAPBN 2026. (Yonatan, 2025)

Berdasarkan **Gambar 4.11**, hal ini mengindikasikan bahwa tuntutan mahasiswa belum berdampak sama sekali dengan adanya anggaran Badan Gizi Nasional yang lebih diprioritaskan dengan menerima anggaran lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang hanya Rp 71 triliun, kini Badan Gizi Nasional pada tahun 2026 akan mendapat anggaran sebesar Rp 268 triliun, hal itu lebih tinggi

dibandingkan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 114 triliun, Kemendiktisaintek sebesar Rp 61 triliun serta Kemendikdasmen sebesar 55 triliun.



Gambar 4.12. Rincian Efisiensi Anggaran 2025 Di Sektor Kesehatan dan Pendidikan. (DPR RI, 2025; Rizaty, 2025)

Perlu ditegaskan lagi bahwa setelah demonstrasi “Indonesia Gelap” pada tanggal 17-21 Februari 2025 tidak adanya perubahan jumlah pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, hal ini dibuktikan pada **Gambar 4.12.**, notabene data tersebut bersumber dari hasil rapat komisi IX dan X DPR RI dengan mitra kerjanya pada 12-13 Februari 2025, seperti mitra kerja komisi IX DPR RI yaitu kementerian kesehatan tetap dipangkas sebesar 19,6 triliun serta mitra kerja komisi X DPR RI yaitu Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, Kemendikbud yang berurutan tetap dipangkas sebesar Rp 14,3 triliun, Rp 7,27 triliun, Rp 1,1 triliun.

B. MALAYSIA

Di sisi lain, dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Malaysia dapat diidentifikasi dari tuntutan mereka dalam demonstrasi “#Tekan”, yaitu mendesak pemerintah untuk membatalkan perluasan SST. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara dengan Presiden GAMIS Malaysia yang menyatakan bahwa setelah demonstrasi tersebut ada dampak terhadap revisi SST seperti pajak

penjualan buah import yang dikecualikan pajak dan pembatalan pajak layanan kesehatan, seperti halnya penggalan dari hasil wawancara di bawah ini:

Artinya, karena desakan kami, meskipun kami tidak dapat membatalkan SST, tetapi karena protes yang kami lakukan, akhirnya beberapa butir buah import dikecualikan dan pajak layanan kecantikan dibatalkan dari pengaruh SST.” (M. Azamuddin Bin Sahar)

Namun, klaim tersebut harus adanya objektif kajian dengan studi dokumentasi resmi dari Ministry of Finance Malaysia berdasarkan Media Release pada tanggal 27 Juni 2025 dan Laporan Socio-Economic Research Centre (SERC) berjudul “Targeted Revised Sales Tax Rate and Expansion of Service Tax Scope (SST)” dipublikasikan pada 9 Juli 2025 yang menjelaskan seperti di bawah ini:

(1) Pengecualian buah impor seperti apel, jeruk, mandarin, kurma dari Sales Tax, revisi tersebut adalah respons terhadap kekhawatiran formal yang diajukan oleh Kuala Lumpur Fruits Wholesalers Association dan importir buah, yang terdokumentasi dalam SERC serta selaras dengan wawancara penulis kepada analis ekonomi regional Malaysia dari Institut Masa Depan Malaysia (MASA) yaitu M. Iman Khidir Tarmidzi yang menyatakan bahwa SST ini sebagian besar ditolak dan didesak oleh komunitas Tionghoa di Malaysia yang merupakan pengusaha serta pedagang di Malaysia; (2) Pembatalan Service Tax pada layanan kecantikan seperti manikur, pedikur, perawatan wajah, pangkas rambut, revisi tersebut adalah respons langsung terhadap *lobbying* dari Malaysia Hairdressing Association, United Asian Hairdressers Association (UAHA), dan Persatuan Anggun Menawan Malaysia (PAMM), yang diminta secara eksplisit dalam dokumentasi SERC; (3) Peningkatan ambang batas Service Tax dari RM 500 ribu menjadi RM 1 juta untuk layanan sewa dan keuangan. Revisi ini adalah kompromi antara permintaan retailer sebesar RM 2 juta dan posisi awal pemerintah di RM 500 ribu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis secara objektif menyimpulkan bahwa ketiga revisi tersebut bukan hanya dampak dari adanya demonstrasi GAMIS pada tanggal 22 Juni 2025. Lebih lanjut, berdasarkan dokumen Media Release Ministry Of Finance (MOF) Malaysia pada tanggal 27 Juni 2025 secara eksplisit menyatakan revisi berdasarkan masukan publik dan umpan balik industri serta keterlibatan industri, jadi frasa “masukan publik” serta terminologi “*feedback from*

the grassroots” dalam dokumen tersebut menjelaskan terkait penghargaan pemerintah Malaysia terhadap masukan dari komunitas lokal dan organisasi tingkat akar rumput salah satunya seperti organisasi mahasiswa, yang mana demonstrasi #Tekan yang diadakan GAMIS pada 22 Juni 2025 jelas masuk dalam kategori ini. Sebagai catatan, demonstrasi #Tekan bukan hanya dihadiri oleh kelompok mahasiswa dari GAMIS, melainkan turut dihadiri oleh perwakilan LSM dari UMMAH, Gerakwanis, HARAM dan Federasi bersama rakyat hampir 100 orang demonstrasi di Dataran Sogo, Kuala Lumpur, ujar Azamuddin Bin Sahar.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis merujuk kembali terhadap klaim Presiden Gamis Malaysia Azamuddin bin Sahar yang menyatakan bahwa “demonstrasi #Tekan memiliki dampak pada perubahan kebijakan SST” klaim tersebut didukung oleh bukti yang telah dibahas sebelumnya, tetapi dengan penegasan bahwa dampak ini adalah parsial, multi faktor, dan juga demonstrasi tersebut bukan penyebab tunggal direvisinya beberapa butir dalam kebijakan pajak penjualan dan jasa (SST).

Oleh sebab itu, demonstrasi #Tekan menunjukkan adanya “indikasi dampak parsial” yang didasarkan pada kontribusinya dalam menciptakan momentum publik yang mendorong revisi beberapa butir dalam kebijakan SST. Sebagai catatan, revisi juga dipengaruhi oleh *lobbying* industri dan masukan formal (MOF-Media Release, 27 Juni 2025). Maka klaim bahwa demonstrasi #Tekan adalah penyebab tunggal tidak dapat didukung.

Selain itu, dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Malaysia dapat diidentifikasi juga dalam demonstrasi “Turun Anwar”, yang salah satu tuntutan nya adalah menuntut kos sara hidup atau beban biaya hidup yang

turunannya yaitu menolak perluasan SST serta menolak penargetan subsidi termasuk subsidi RON95, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Presiden Gamis yang menyatakan:

“Untuk RON95 harga minyak telah turun. Singkatnya, setelah dampak demonstrasi Turun Anwar yang kami lakukan, dampaknya harga satu liter minyak RON 95 dari RM 2,05 menjadi RM 1,99 untuk saat ini.” (M. Azamuddin Bin Sahar)

Namun, klaim tersebut harus adanya objektif kajian melalui sumber informasi tambahan dari analis ekonomi MASA yaitu M. Iman Khidir Tarmidzi., BEc yang secara eksplisit menyatakan bahwa pengurangan harga RON95 sudah diumumkan pada tanggal 23 Juli 2025, hal ini berarti harus diketahui terlebih dahulu terkait kronologi singkat demonstrasi Turun Anwar, seperti halnya yang terdokumentasikan oleh GAMIS Malaysia pada **Gambar 4.13**.



Gambar 4.13. Timeline himpunan Turun Anwar.
(Instagram GAMIS Malaysia, 2025)

Berdasarkan **Gambar 4.13**. yang berarti *timeline* himpunan Turun Anwar telah muncul ke publik pada tanggal 6 Juli 2025 yang dibuktikan dengan adanya penyebaran poster persuasif ke publik, sebelum terjadinya demonstrasi Turun Anwar pada tanggal 26 Juli 2025 di Kuala Lumpur, GAMIS Malaysia telah mengajak ke seluruh mahasiswa di malaysia untuk ikut demonstrasi tersebut pada

tanggal 22 Juli 2025. Hal ini berarti dokumen Ucapan YAB Dato' Seri Anwar Bin Ibrahim yang berjudul "Penghargaan Untuk Rakyat Malaysia" pada tanggal 23 Juli 2025 adanya "dugaan" untuk meredam dampak dari demonstrasi "Turun Anwar". Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Presiden GAMIS Malaysia selaku yang memobilisasi mahasiswa dalam demonstrasi tersebut, beliau menyatakan:

"Himpunan 'Turun Anwar' pada 6 Juli 2025 berada di tingkat negara bagian Selangor, sehingga negara bagian lain juga didesak untuk melakukan hal yang sama, lalu mencapai puncaknya pada tanggal 26 Juli. Dalam himpunan tersebut memang dibahas, tetapi tidak dibahas secara kritis, mengapa? Karena saat itu kami memiliki terlalu banyak masalah, sehingga kami harus menyebutkan beberapa masalah secara singkat, masalah-masalah tersebut tidak dibahas secara kritis atau lebih mendalam, tetapi masalah tersebut ada terkait penyasaran RON95, Pajak (SST), dan tarif listrik, semuanya ada di sana." (M. Azamuddin Bin Sahar-Presiden GAMIS Malaysia)

Berdasarkan penggalan hasil wawancara tersebut, yang menunjukkan fakta bahwa adanya pembahasan awal dari koalisi oposisi Malaysia pada 6 Juli 2025 mengenai salah satu tuntutan terhadap kebijakan PM Anwar seperti penargetan subsidi RON95 dan pajak (SST). Lebih lanjut, adanya laporan dari perusahaan riset Merdeka Centre yang mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim memperoleh tingkat persetujuan sebesar 55% pada Mei 2025, menandai peningkatan yang signifikan dari 43% pada Juni tahun lalu. Tingkat persetujuan pemerintah federal juga naik menjadi 50%, dari 40% pada periode yang sama. Peningkatan tingkat persetujuan tersebut penyebab utamanya yaitu masalah ekonomi yang berhasil ditangani oleh PM Anwar Ibrahim (Merdeka Centre, 2025).

Selanjutnya diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan individu profesional di Malaysia yang paham betul mengenai situasi dan kondisi ekonomi-politik disana, yang menyatakan bahwa pra-demonstrasi "Turun Anwar" pemerintah Malaysia berhasil meredam kemarahan publik terhadap masalah

ekonomi, salah satunya dengan mengurangi harga bensin RON95 dan membagikan bantuan sosial sebanyak RM 100 ke Warga Negara Malaysia berumur 18 tahun keatas. Selanjutnya, pasca-demonstrasi “Turun Anwar” menunjukkan pemerintah Malaysia berhasil membingkai ulang narasi. Jumlah peserta yang diperkirakan polisi hanya 18.000 jauh lebih rendah dari klaim resmi oposisi sebesar 300.000 dan ini dikemas pemerintah sebagai bukti bahwa oposisi gagal menggerakkan massa secara masif.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hal ini memperkuat argumen penulis yang menyatakan bahwa PM Anwar Ibrahim mempublikasikan dokumen Ucapan YAB pada tanggal 23 Juli 2025 sebelum demonstrasi Turun Anwar dikarenakan adanya “dugaan kepentingan” untuk menjaga basis suara pemilihnya serta meredam atensi publik terhadap demonstrasi “Turun Anwar”.

Adapun, perlu diketahui juga isi dokumen Ucapan YAB Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim Perdana Menteri pada tanggal 23 Juli 2025 yang berjudul “Penghargaan Untuk Rakyat Malaysia” dalam Alinea kelima poin (c-g), berbunyi:

“(c) Seterusnya, Kerajaan kekal dengan perancangan menyasarkan subsidi petrol RON95 dengan perincian bakal diumumkan menjelang akhir September 2025; (d) Apa yang pasti, sepertimana pendekatan penyasaran subsidi elektrik, Kerajaan beri jaminan rakyat biasa tidak akan terjejas; bahkan, sukacita saya umumkan harga petrol RON95 akan turun untuk rakyat; (e) Apabila penyasaran subsidi RON95 dilaksanakan nanti, rakyat Malaysia akan menikmati harga RON95 lebih rendah iaitu RM 1,99 seliter. Ini tentunya beri manfaat sekitar 18 juta pemandu kereta dan penunggang motosikal termasuk belia seawal usia 16 tahun dan pekerja gig; (f) Pendekatan bersasar ini sejajar dengan ikhtiar Kerajaan untuk mengoptimum sumber negara bagi manfaat rakyat dan mengurangkan pembaziran subsidi. Bagi tahun 2023 dan 2024, subsidi RON95 sahaja dianggarkan menelan belanja hampir RM 20 bilion setahun—sungguhpun tahun ini harga minyak dunia mengalami penyusutan, harga petrol RON95 tanpa subsidi masih sekitar RM 2.50 seliter jauh lebih tinggi daripada harga bersubsidi untuk rakyat; (g) Pada masa yang sama, warganegara asing perlu membayar pada harga pasaran tanpa subsidi.”

Berdasarkan penggalan pernyataan resmi dalam dokumen tersebut, dapat diartikan bahwa telah adanya komitmen awal dari PM Anwar Ibrahim untuk menurunkan harga subsidi RON 95 bagi rakyat Malaysia, tetapi warga negara asing saja yang tidak mendapatkan manfaat dari subsidi ini. Namun, pengumuman tersebut berdasarkan informasi dari Ismail (2025), singkatnya penurunan harga RON95 tidak membuat batalnya demonstrasi “Turun Anwar” pada tanggal 26 Juli 2025, hal ini sebagaimana yang dinyatakan Ahli Parlemen Pasir Mas yaitu Fadhli Shaari yang menyatakan:

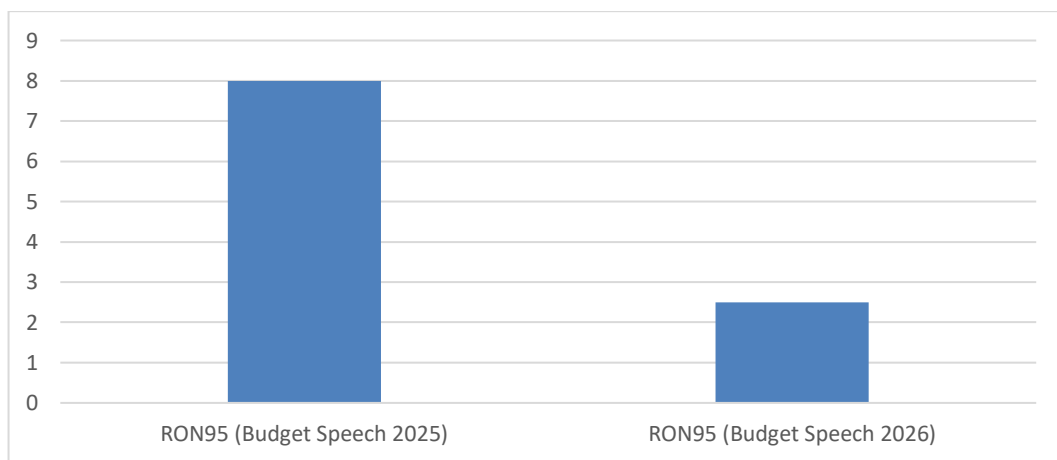
“Turun tetap turun! 26 Julai jumpa di Kuala Lumpur,” (Fadhli Shaari).

Merujuk kembali dokumen Ucapan YAB Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim yang berjudul “Penghargaan Untuk Rakyat Malaysia” merupakan strategi cerdas PM Anwar Ibrahim untuk menjaga basis suara pemilih dan meredam atensi publik terhadap demonstrasi Turun Anwar yang bakal terjadi, seperti halnya diperkuat oleh pembahasan sebelumnya. Merujuk ke dalam komitmen Anwar Ibrahim untuk mengurangi harga RON95 pada bulan September, hal ini telah tertulis dalam dokumen Soalan Lazim (FAQ) Individu Penyasaran Subsidi RON95 dalam halaman (1-10) dengan tanggal pembaruan dokumen pada 28 September 2025 yang berbunyi:

“BUDI95 merupakan subsidi bersasar (*targeted subsidy*) melalui pendekatan harga berperingkat (*tiered pricing*) yang mana warganegara dengan menggunakan MyKad menikmati harga bersubsidi RON95 RM 1,99 seliter sementara bukan warganegara akan dikenakan harga pam pada tahap tanpa subsidi, yang kini dianggarkan sekitar RM2.60 seliter.”,...dengan harga bersubsidi RM 1,99 seliter sehingga 300 liter sebulan. Baki kelayakan BUDI95 ini akan diperbaharui pada setiap awal bulan”.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan secara objektif, meskipun ada “dugaan kepentingan” PM Anwar Ibrahim ingin meredam atensi publik terhadap

demonstrasi “Turun Anwar” serta menjaga basis suara pemilihnya dengan mempublikasikan dokumen YAB, tetapi penulis dalam hal menarik kesimpulan tidak ingin berspekulasi, jadi dengan keterbatasan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa demonstrasi “Turun Anwar” yang melibatkan elemen mahasiswa, bersama tekanan dari partai oposisi, pelaku usaha, dan komunitas lain, menjadi salah satu faktor politik yang mengiringi revisi kebijakan penargetan (penyasaran) subsidi bensin RON95.



Gambar 4.14. Pengurangan Jumlah Pemangkasan Anggaran Subsidi RON95.
(Sumber: Ministry of Finance Malaysia, 2025-2026)

Lebih lanjut, sebagaimana terlihat pada **Gambar 4.14.** bahwa dokumen Budget Speech 2026 yang dipublikasikan pada 10 Oktober 2025 menunjukkan jumlah pemangkasan anggaran subsidi bensin RON95 sebesar RM 2.5 miliar, pemangkasan tersebut lebih rendah daripada yang tertuang dalam Budget Speech 2025 yang memangkas sebesar RM 8 miliar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah demonstrasi “Turun Anwar” pada 26 Juli 2025 yang sebagian kecil pesertanya adalah Mahasiswa bersama tekanan dari partai oposisi, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat lainnya, adanya “indikasi dampak parsial” dalam merevisi kebijakan *austerity*, yaitu revisi kebijakan Rasionalisasi Subsidi RON95 berupa pengurangan jumlah pemangkasan anggaran subsidi RON95.

Maka dari itu, berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat dibandingkan berdasarkan level komparasi dari Uwe Flick (2018), sebagaimana yang terlihat pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3. Komparasi Isu dan Dampak Penolakan Mahasiswa Terhadap Kebijakan *Austerity* di Indonesia dan Malaysia Pada Tahun 2025

Negara		Indonesia	Malaysia
Akar kebijakan <i>austerity</i>		Inpres Nomor 1 Tahun 2025	Budget Speech 2025
Jenis <i>austerity</i>		<i>expenditure-based austerity</i>	<i>expenditure and tax-based austerity</i>
ISU	Aksi penolakan mahasiswa terhadap kebijakan <i>austerity</i> pada tahun 2025	Teridentifikasi dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” yang sebagian besar pesertanya adalah mahasiswa yang menolak pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan	Teridentifikasi dalam demonstrasi “#Tekan” yang sebagian besar pesertanya dari kalangan Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia (GAMIS) serta demonstrasi “Turun Anwar” yang sebagian kecil pesertanya adalah mahasiswa yang menolak terhadap penyesaran subsidi RON95 dan SST
	Bentuk penolakan mahasiswa	Resistensi tidak kentara, penentangan publik mengganggu, penolakan militan.	Resistensi tidak kentara, penentangan publik tidak mengganggu, dan penentangan publik mengganggu.
DAMPAK	Dampak penolakan mahasiswa	Belum berdampak dalam membatalkan atau merevisi kebijakan <i>austerity</i>	Memiliki indikasi dampak parsial dalam merevisi kebijakan <i>austerity</i> (tanpa membatalkan kebijakan inti)

Sumber: Diolah penulis, 2025

Berdasarkan **Tabel 4.3.**, implikasi pengembangan teori penghematan (*austerity*) dari Alesina et al. (2019) dan teori penolakan (*refusal*) dari Bailey & Shibata (2019) dalam penelitian ini, yaitu adanya perbedaan dalam konteks jenis penghematan dan bentuk penolakan di kedua negara. Di Indonesia sendiri kebijakan pemangkasan anggaran di kementerian pendidikan dan kesehatan yang berakar dari Inpres No. 1 Tahun 2025 berjenis *expenditure-based austerity*.

Selain itu, aksi penolakan dari elemen mahasiswa di Indonesia pada tahun 2025 teridentifikasi dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” pada tanggal 17-21

Februari 2025 yang bentuk penolakannya resistensi tidak kentara, penentangan publik mengganggu dan penolakan militan belum berdampak dalam membatalkan atau merevisi kebijakan efisiensi anggaran terutama masih tetapnya jumlah pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan pasca demonstrasi “Indonesia Gelap”, hal tersebut dibuktikan oleh pembahasan data dan fakta sebelumnya.

Di sisi lain, di Malaysia pada tahun 2025 kebijakan pemangkasan anggaran subsidi RON95 dan *Sales and Service Tax* (SST) dalam Budget Speech 2025 berjenis *expenditure and tax-based austerity*. Sedangkan, aksi penolakan dari elemen mahasiswanya ada di dalam dua demonstrasi yaitu: (1) demonstrasi “#Tekan” pada tanggal 22 Juni 2025 dengan bentuk penolakan resistensi tidak kentara dan penentangan publik tidak mengganggu memiliki “indikasi dampak parsial” dalam merevisi beberapa butir pajak penjualan buah impor yang dikecualikan (apel, jeruk, jeruk mandarin, kurma) dan pembatalan pajak layanan kecantikan (pedikur, manikur, perawatan wajah, pangkas rambut), dan revisi ambang batas bagi layanan sewa dan keuangan (dari RM 500 ribu menjadi RM 1 juta); (2) demonstrasi “Turun Anwar” yang dimulai puncaknya pada 26 Juli 2025 dengan bentuk penolakan resistensi tidak kentara dan penentangan publik mengganggu memiliki “indikasi dampak parsial” dalam merevisi kebijakan pemangkasan anggaran subsidi RON95 (dari RM 8 miliar pada tahun 2025 menjadi RM 2.5 miliar pada tahun 2026), hal tersebut dibuktikan oleh pembahasan data dan fakta sebelumnya.